

## IDENTIFIKASI FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN

Faisma Nuril Luthfiyyah<sup>1)</sup>, Ruth Eviana Hutabarat<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya  
email: [faisma.21021@mhs.unesa.ac.id](mailto:faisma.21021@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2)</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya  
email: [ruthhutabarat@unesa.ac.id](mailto:ruthhutabarat@unesa.ac.id)

### ABSTRAC

*Banten is a province that has the highest open unemployment rate in Indonesia. Meanwhile, Banten's Gross Regional Domestic Product is on a large scale with a high status Human Development Index, and the Minimum Wage increases every year. This research aims to determine the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI), and Regency/City Minimum Wage (UMK) on the Open Unemployment Rate in Banten Province. This research uses quantitative methodology with panel data from eight districts and cities in Banten Province from 2017 to 2023. Multiple regression analysis in this research uses the E-Views 12 tool. Research findings show that each independent variable is Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI), and Regency/City Minimum Wage (UMK) have a significant effect on the Open Unemployment Rate (TPT). Together, the Open Unemployment Rate (TPT) in Banten Province is also significantly influenced by all independent variables with a coefficient of determination reaching 73%.*

**Keywords:** *Open Unemployment, Gross Regional Domestic Product, Human Development Index, Minimum Wage*

### ABSTRAK

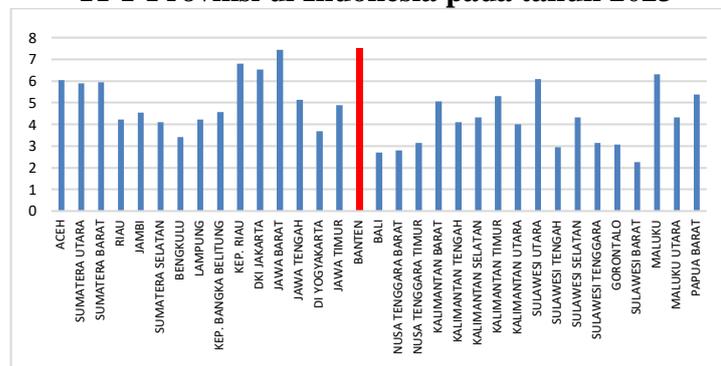
Banten merupakan provinsi yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto Banten termasuk berskala besar dengan Indeks Pembangunan Manusia berstatus tinggi, dan Upah Minimum yang mengalami kenaikan setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan data panel dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 hingga 2023. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan alat bantu E-Views 12. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masing – masing variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Apabila bersama – sama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten juga dipengaruhi signifikan oleh semua variabel independen dengan koefisien determinasi mencapai 73%.

**Kata Kunci:** Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum

## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memasuki momen bonus demografi. Keadaan ini bisa menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Namun kenyataannya pada saat ini yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah pengangguran. Menurut *World Economic Outlook (2024)* tingkat pengangguran Indonesia tertinggi di antara negara Asia Tenggara dengan angka mencapai 5,2%. Artinya setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat pengangguran sekitar 5 orang. Pengangguran tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan nasional. Apabila suatu negara berupaya untuk mengurangi jumlah pengangguran maka pendapatan nasional akan naik (Mankiw, 2018). Menurut Kuncoro (2015), pengangguran adalah keadaan ketika seseorang tidak sedang bekerja, tidak memiliki pekerjaan, berusaha mencari pekerjaan yang diinginkan, sedang menunggu panggilan kerja, atau sedang memulai suatu usaha. Persentase pengangguran dibagi berdasarkan jumlah total angkatan kerja menjadi dasar penghitungan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Pemerintah menggunakan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun ke tahun sebagai bahan penilaian atau evaluasi ketenagakerjaan. Selain itu perkembangan TPT juga sebagai acuan dalam rencana pembangunan lapangan pekerjaan.

**Gambar 1**  
**TPT Provinsi di Indonesia pada tahun 2023**



Pada tahun 2023, provinsi dengan kontribusi tingkat pengangguran tertinggi bagi Indonesia adalah Banten. Berdasarkan data BPS, Pada tahun 2021, TPT Banten turun menjadi tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Namun, pada tahun 2022 hingga 2023, TPT Banten justru melonjak lagi menjadi yang pertama dengan angka berturut – turut 7,97% dan 7,52%, tingkat pengangguran ini lebih besar dibandingkan tingkat pengangguran nasional masing-masing sebesar 5,86% dan 5,32% pada tahun 2022 dan 2023. Adanya pengangguran tinggi sama halnya seperti menyia-nyiakan sumber daya berharga yang tersedia (Samoelson & Nordhaus, 2004). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum bisa memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas adalah penggerak ekonomi suatu wilayah. Ditinjau dari kuantitas akan berpengaruh pada sisi penawaran dan permintaan. Dalam sisi penawaran dapat menjadi pemasok tenaga kerja dan dalam sisi permintaan sebagai konsumen berdaya beli tinggi. Sedangkan ditinjau dari kualitas berpengaruh pada produktivitas output barang dan jasa (Mulyadi, 2019).

Strategi pembangunan dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten untuk meningkatkan srtandar hidup masyarakat, salah satunya dengan menanggulangi pengangguran yang tinggi. Menurut (Hastin & Siswadhi, 2021) pembangunan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pertumbuhan PDRB. Saat daya beli meningkat, perusahaan akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa sesuai kenaikan permintaan konsumen. Keadaan ini mendorong perusahaan meningkatkan permintaan tenaga kerja baru dan menurunkan pengangguran. (Prasetyani, & Sumardi, 2020). Dalam hal ini sebenarnya kinerja pemerintah Banten tidak

buruk. Perkembangan PDRB Banten sejak 7 tahun terakhir mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2023, nilai PDRB provinsi Banten sebesar 507.427,24 miliar rupiah. Nilai tersebut berada di atas rata – rata penghasilan PDRB provinsi di Indonesia yaitu sebesar 327.353,9 miliar rupiah. Sehingga menempatkan Banten ke dalam provinsi dengan penghasilan PDRB berskala besar di atas rata – rata provinsi di Indonesia.

Selain mengkaji dari komponen pendapatan produksi suatu daerah. Faktor lain yang tidak kalah penting yakni kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja itu sendiri. Kualitas SDM suatu wilayah dapat diketahui berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di tahun 2023, IPM Banten berada pada angka 73,87%. Nilai IPM Banten tersebut berada di urutan ketiga provinsi di Pulau Jawa, setelah DI Yogyakarta sebesar 81,07% dan DKI Jakarta sebesar 82,46%. Skor IPM Banten termasuk tinggi. Tingginya skor IPM menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh akses terhadap hasil pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan penelitian (Mahihody, A., et al., 2018) IPM tinggi berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Manado. Menurut (Soeharjoto & Oktavia, M. R., 2021) semakin baiknya akses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi produktifitas dan kualitas manusia sebagai sumber tenaga kerja. Sehingga banyak negara berupaya meningkatkan IPM untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor penyebab pengangguran lainnya yaitu faktor upah. Pengangguran yang terjadi dalam perekonomian biasanya disebabkan oleh peraturan upah minimum. Pemerintahan Banten dalam hal pengupahan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tinggi di beberapa wilayahnya. Menurut (Erlangga et al., 2024) upah minimum adalah standar upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerja di sektor formal sesuai dengan kebijakan upah minimum di wilayah tersebut. Suatu kebijakan upah minimum dapat berpengaruh pada penawaran tenaga kerja melalui keputusan sebuah perusahaan untuk menambah atau mengurangi jumlah pekerja. Pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik merilis besaran UMK diseluruh wilayah Indoneisa. Terdapat Kabupaten/kota dengan besaran UMK tertinggi di Indonesia dengan UMK di atas empat juta rupiahm di antaranya adalah Kabupaten/Kota yang berasal dari provinsi Banten yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Meskipun Banten memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, akan tetapi setiap tahunnya peraturan upah minimum Provinsi Banten selalu mengamalami kenaikan. Berdasarkan latar belakang informasi yang diuraikan di atas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di provisini Banten ditinjau dari faktor PDRB, IPM,dan UMK. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, IPM, dan UMK secara parsial terhadap TPT di Provinsi Banten pada tahun 2017 hingga 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, IPM, dan UMK secara simultan terhadap TPT di Provinsi Banten pada tahun 2017 hingga 2023.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keynes**

Menurut (Hasan et al., 2020) teori Keynesian berpendapat bahwa daya beli masyarakat diciptakan dari balas jasa faktor produksi seperti upah, sewa, bunga dan lain-lain. Pendapatan yang diterima akan dibelanjakan. Seorang lebih memilih bekerja dengan gaji kecil daripada menganggur tidak ada pemasukan pendapatan. Hal ini membuat semua tenaga kerja terserap penuh lewat perusahaan yang memperkerjakan lebih banyak. Akan tetapi para buruh juga tidak akan diam saja bersedia bekerja dengan penurunan tingkat upah yang ditawarkan. Sehingga, apabila upah turun, daya beli masyarakat ikut turun. Saat itu produktivitas tenaga kerja turun menyebabkan perusahaan menghemat biaya produksi dengan diberhentikan sebagian tenaga kerja. Maka tingkat pengangguran semakin tinggi.

Lebih lanjut lagi mengenai konsep Keynesian, pasar tenaga kerja selalu mengikuti keadaan pasar barang. Apabila terjadi kenaikan output (Q) maka tingkat *employment* (N) juga akan naik (Boediono, 2012). Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan produksi pada barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan jumlah orang bekerja. Begitu pun sebaliknya, apabila produksi barang dan jasa menurun, maka terjadi pengurangan jumlah orang bekerja atau menimbulkan pengangguran.

Keyness berpendapat bahwa para buruh memiliki semacam serikat kerja, di mana para buruh tidak akan diam saja dengan penurunan upah atau dengan tingkat upah berlaku lebih rendah dari kebutuhan hidup pekerja. Sehingga hak-hak pekerja terhadap penurunan gaji dapat dipertahankan oleh serikat pekerja (Mulyadi, 2019). Pandangan Keyness lainnya yang bertolak belakang dengan kaum klasik menyatakan bahwa tingkat pengangguran di suatu wilayah tidak dapat dikendalikan dengan tingkat upah karena tingkat upah bersifat tidak fleksibel (Murni, A., 2013). Artinya setiap kenaikan tingkat pengangguran yang terjadi hampir tidak mungkin menurunkan tingkat upah yang berlaku seperti peraturan upah minimum.

Pada intinya upah menurut klasik adalah upah fleksibel yang dapat menciptakan titik keseimbangannya sendiri karena penawaran tenaga kerja akan menciptakan permintaannya sendiri. Akan tetapi menurut Keyness, upah bersifat tidak fleksibel karena adanya serikat kerja atau peraturan seperti upah minimum. Harga – harga cenderung lambat menyesuaikan diri. Butuh bantuan pemerintah untuk membantu menyesuaikan upah. Keyness tidak setuju semua pengangguran voluntari menurut klasik adalah pengangguran yang dengan sukarela tidak mau bekerja. Namun, ada juga bagian pengangguran involuntari, biasanya terjadi karena sedikitnya lowongan kerja dari penambahan tenaga kerja.

### ***Teori Human Capital***

Teori human capital menjelaskan bagaimana manusia juga seperti mesin dan teknologi yang mempunyai aktivitas perekonomian seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Sehingga kualitasnya bisa dinilai atau dihitung lewat indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kesempatan kerja. Efisiensi produksi dapat lebih optimal jika pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja meningkat, sehingga dapat menurunkan biaya produksi per unit barang. Saat harga produksi barang lebih rendah, harga jual juga ikut turun. Penurunan harga menyebabkan permintaan naik dan perusahaan akan menambah tenaga kerja (Todaro & Smith, 2012).

Menurut (Mahroji & Nurkhasanah, 2019) korelasi IPM menunjukkan ke arah negatif terhadap tingkat pengangguran. Semakin angka IPM naik, maka jumlah pengangguran akan berkurang. Apabila IPM mengalami kenaikan, mengindikasikan kenaikan pada faktor kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), faktor pendidikan tentang rata – rata seseorang dalam menempuh sekolah, kemampuan literasi, dan pendapatan per kapita. Lebih rinci lagi, indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan memiliki peranan penting terhadap perekonomian suatu negara. Perusahaan saat menghadapi kelebihan permintaan kerja, cenderung memilih berdasarkan tingkat pendidikan pelamar kerja. Dalam segi kesehatan, seseorang yang sehat akan mampu bekerja dengan maksimal daripada yang sedang sakit (Todaro & Smith, 2012). Dalam teori Keyness, terkait pengeluaran masyarakat atas barang dan jasa merupakan penentu aktivitas perekonomian suatu negara. Apabila permintaan naik, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru (Sukirno 20,13)

### **HIPOTESIS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah tentang tingkat pengangguran di provinsi Banten dan juga keadaan PDRB, IPM, dan UMK. Serta sejumlah teori yang mendukung, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga variabel PDRB, IPM, dan UMK masing – masing memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2023.

2. Diduga variabel PDRB, IPM, dan UMK bersama - sama memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2023.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dengan data panel. Data panel yang digunakan adalah time series selama tujuh tahun sebelumnya (2017–2023) dan cross sectional meliputi delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. PDRB, IPM, dan UMK merupakan variabel independen yang digunakan. Definisi operasional variabel meliputi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam satuan miliar rupiah, IPM dalam satuan persen (%), dan UMK dalam satuan rupiah. Sementara itu, TPT digunakan sebagai variabel terikat dengan satuan persen (%). Data termasuk data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Kemudian, dilakukan regresi linear berganda dengan alat analisis E-views 12. Persamaan model tersaji sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1.X1_{it} + \beta_2.X2_{it} + \beta_3.X3_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

Y	: Tingkat Pengangguran Terbuka
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien Variabel bebas
X1	: Produk Domestik Regional Bruto
X2	: Indeks Pembangunan Manusia
X3	: Upah Minimum Kabupaten/Kota
e	: Error
i	: 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten (Cross section)
t	: Rentang tahun 2017 – 2023 (Time Series)

Selanjutnya, dalam memilih model regresi terbaik terdapat tiga pengujian yang akan diterapkan pada data panel yaitu Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji asumsi klasik dalam data panel yang digunakan hanya dua yaitu heteroskedastisitas dan multikolinearitas, kemudian untuk mengetahui pengaruh individu variabel independen digunakan uji T. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh gabungan variabel independen digunakan uji F. Kemudian, uji koefisien determinasi untuk menilai kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### Uji Pemilihan Model

Beberapa tes pendekatan dilakukan untuk pemilihan model terbaik data panel. Uji Chow merupakan uji seleksi model awal untuk memilih antara model Common Effect Model atau Fixed Effect Model.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Chow**

Effect Test	Stat	df	P-value
Nilai Crossection F	113.811.049	(7.45)	0.000
Nilai Crossection Chi-Square	57.063.241	7	0.000

Sumber: Hasil Eviews diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 1 hasil uji Chow pada nilai Crossection F sebesar 0.000 dan nilai Crossection Chi-Square sebesar 0.000. Kedua nilai tersebut berada di bawah tingkat alpha yaitu 0.05. Sehingga model yang digunakan adalah FEM. Kemudian uji Hausman untuk memilih model Random Effect Model atau Fixed Effect Model.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Stat	df	P-value
Nilai Crossection Random	77.286.347	3	0.0000

Sumber: Hasil Eviews diolah, 2024.

Tabel di atas adalah hasil Uji Hausman, diperoleh nilai Crossection Random sebesar 0.0000. Nilai tersebut berada di bawah tingkat alpha 0.05. Sehingga model yang terpilih adalah FEM. Selanjutnya, dikarenakan hasil dari dua pengujian sebelumnya yaitu uji Chow dan uji Hausman menghasilkan pemilihan model FEM, maka uji Lagrange Multiplier tidak lagi diperlukan.

### Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik dalam data panel tidak mengharuskan semuanya. Menurut Ajija dkk. (2011) menyatakan jika titik data pengamatan lebih dari 30, maka uji normalitas tidak diperlukan. Hal ini disebabkan distribusi kesalahan pengambilan sampel hampir ke arah normal untuk data dengan lebih dari 30 observasi. Basuki (2021) menyatakan bahwa uji autokorelasi tidak diikuti dalam regresi data panel karena autokorelasi hanya terjadi pada data bersifat runtut waktu, namun data panel lebih difokuskan pada cross-sectional. Oleh karena itu, hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang akan digunakan.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	X1	X2	X3
PDRB	1.000.000	0.626468	0.707290
IPM	0.626468	1.000.000	0.663141
UMK	0.707290	0.663141	1.000.000

Sumber: Hasil Eviews diolah, 2024.

Pada tabel 3 hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai korelasi qantar variabel independent yaitu PDRB, IPM, dan UMK di bawah 0.80. sehingga data dinyatakan terbebas dari muktikolinearitas. Selanjutnya masuk pada uji heteroskedastisitas untuk mengetahui varian residual dari model regresi ke bentuk pengamatan lainnya. Model regresi dinilai baik jika terbebas masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-Stat	P-Value
TPT	1.276.652	1.440.328	0.886362	0.3801
PDRB	-4.22E-08	2.83E-08	-1.490549	0.1431
IPM	-0.164194	0.222895	-0.736641	0.4652
UMK	5.83E-07	4.15E-07	1.406.036	0.1666

Sumber: Hasil Eviews diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas P-Value dari variabel independen PDRB sebesar 0.1431, variabel IPM memiliki p-value 0.4652, dan variabel UMK memiliki p-value 0.1666. nilai p-value semua variabel independent di atas tingkat alpha 0.05. Sehingga data terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis

**Tabel. 4**  
**Hasil Estimasi Fixed Effect Model**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	Prob.
TPT	9.208.502	2.626.794	3.505.606	0.0010
PDRB	-2.34E-07	5.16E-08	-4.541.950	0.0000
IPM	-1.150.305	0.406504	-2.829.750	0.0069
UMK	3.51E-06	7.57E-07	4.632.572	0.0000
<b>Prob (F-statistic)</b>			0.000000	
<b>Adjusted R Square</b>			0.737086	

Sumber: Hasil Output Eviews diolah, 2024.

Tabel di atas merupakan hasil estimasi regresi linear berganda dengan model fixed effect. Kemudian berikut persamaan model hasil pengujian.

$$\text{TPT} = 92.0850249189 - 2.3445960148\text{e-}07*\text{PDRB} - 1.15030534669*\text{IPM} + 3.50548231045\text{e-}06*\text{UMK} + \text{eit}$$

Interpretasi nilai konstanta dan nilai koefisien variabel bebas yang dapat diambil dari persamaan di atas yaitu:

- 1) Nilai konstanta (intersep) sebesar 92.0850249189. Artinya jika variabel PDRB (X1), IPM (X2), dan UMK (X3) bernilai tetap, maka TPT memiliki nilai sebesar 92.0850249189.
- 2) PDRB sebagai X1 memiliki nilai koefisien sebesar -2.3445960148e-07. Maka setiap kenaikan variabel PDRB sebesar 1% akan menurunkan variabel TPT (Y) sebesar 2.3445960148e-07.
- 3) IPM sebagai X2 memiliki nilai koefisien sebesar 1.15030534669. Maka setiap kenaikan IPM sejumlah 1%, akan menurunkan nilai variabel TPT sebesar 1.15030534669.
- 4) UMK sebagai X3 memiliki nilai koefisien 3.50548231045e-06. Maka setiap kenaikan UMK sebesar 1%, akan menaikkan nilai variabel TPT sebesar 3.50548231045e-06.

### Uji T

Uji T digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Dengan hasil uji T tersaji dalam Tabel 4 Sementara penjelasan mengenai hasil temuan uji T variabel PDRB, IPM, dan UMK terhadap tingkat pengangguran sebagai berikut:

1. Nilai p-value variabel PDRB sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, TPT di Provinsi Banten dipengaruhi signifikan oleh variabel PDRB.
2. Nilai p-value variabel IPM sebesar 0,0069 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, TPT di Provinsi Banten dipengaruhi secara signifikan oleh variabel IPM.
3. Nilai p-value variabel UMK sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 tingkat signifikansi. Jadi, variabel UMK berpengaruh terhadap TPT di provinsi Banten dengan signifikan.

### Uji F

Uji F atau tes simultan digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengaruh secara bersama – sama dari variabel independent dalam penelitian terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan 5% atau alpha 0,05. Berdasarkan tabel 4, nilai probabilitas F-Statistics sebesar 0,000000. Angka tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian variabel PDRB, IPM, dan UMK secara bersama - sama memiliki pengaruh cukup besar atau signifikan terhadap TPT di Provinsi Banten.

### Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R lebih cenderung digunakan untuk menentukan koefisien determinasi pada regresi berganda dengan beberapa variabel independen. Berdasarkan tabel 4, data uji koefisien determinasi, skor Adjusted R Square sebesar 0,737086. Hal ini menunjukkan bahwa 73% variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen yang terekam dalam penelitian ini. Sementara itu, 27% sisanya adalah aktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang dilakukan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel X1 menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang kurang dari 5% atau alpha (0,05). Oleh karena itu hipotesis diterima. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel PDRB (X1) pada delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Koefisien TPT variabel PDRB sebesar  $-2,34E-07$  bertanda negatif. Dengan demikian, untuk setiap kenaikan PDRB sebesar 1% tingkat pengangguran di Provinsi Banten dapat diturunkan sebesar 0,000000234.

PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen terhadap barang dan jasa menyebabkan pertumbuhan produksi. Hasil ini valid dibuktikan dengan teori Keynesian tentang permintaan agregat. Kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah permintaan agregat. Kenaikan permintaan agregat mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. Pada keadaan tersebut perusahaan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Dengan demikian, dapat meningkatkan perekrutan pekerja baru dan menurunkan pengangguran.

Hasil penelitian (Arizal & Marwan, 2019) searah dengan hasil penelitian ini bahwa TPT di Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh PDRB. Kemudian penelitian oleh (Qausar & Aminda, 2022) juga menyatakan hasil bahwa tingkat pengangguran di provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi negatif signifikan oleh PDRB, setiap kenaikan PDRB di kabupaten/kota Kepulauan Riau mampu menurunkan tingkat pengangguran.

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan variabel Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel X2 mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0069 di bawah tingkat alpha 0,05. Artinya mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan koefisien pengaruh negatif bernilai  $-1,150305$ . Oleh karena itu, kenaikan IPM sebesar 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1,150305. Hal ini berlaku di delapan kota atau kabupaten di Provinsi Banten.

Teori *Human Capital* menjelaskan tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang memperhatikan faktor pendidikan dan Kesehatan, sehingga perusahaan lebih memilih tenaga kerja berkualitas untuk memaksimalkan produksi barang dan jasa. Dengan meningkatnya IPM mampu menurunkan pengangguran. Perusahaan tertarik untuk memperkerjakan tenaga kerja berkualitas dengan produktivitas tinggi. Apabila produktivitas naik, maka biaya marginal barang berkurang. Sehingga harga produksi per unit akan turun, dan menarik daya beli masyarakat. Kenaikan daya beli masyarakat juga tercermin dari kenaikan pendapatan per kapita dalam salah satu unsur yang dihitung dalam IPM. Apabila pendapatan masyarakat naik, maka kebutuhan atau keinginan terhadap barang dan jasa juga akan naik. Sehingga perusahaan menarik tenaga kerja baru untuk meningkatkan faktor produksi. Hal ini sejalan dengan teori Keynes tentang kenaikan permintaan agregat dapat mengurangi pengangguran. Kemudian, penelitian ini seiras dengan hasil (Mahihody, et al, 2018) yang

menyatakan bahwa IPM berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengangguran.

### **Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Peraturan upah yang berlaku di wilayah kabupaten/kota Provinsi Banten dikenal dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Berdasarkan hasil uji parsial, UMK berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten secara signifikan. Hal ini didasarkan pada nilai signifikan  $(0,000) < 0,05$ , kemudian koefisien yang dimiliki menunjukkan korelasi positif  $3.51E-06$ . Artinya setiap kenaikan 1% UMK, akan menyebabkan kenaikan pengangguran di provinsi Banten sebesar 0,00000351.

Kenaikan upah setiap tahunnya di provinsi Banten adalah bagian dari kebijakan upah minimum yang telah diatur pemerintah. Sangat mustahil UMK mengalami penurunan meskipun terjadi pengangguran yang tinggi. Hal ini sejalan dengan teori keyness tentang upah tidak fleksibel. Upah yang tinggi di provinsi Banten menyebabkan perusahaan melakukan relokasi usaha di daerah lain seperti Jawa Tengah dengan upah pekerja yang jauh lebih murah. Relokasi perusahaan ini membuat pemutus hubungan kerja (PHK) dan membuat efek berkelanjutan seperti gulung tikarnya usaha warung makan dan penginapan di sekitar perusahaan. Hal tersebut membuat seseorang kehilangan usahanya akibat permintaan yang menurun.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil uji keseluruhan dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2017 hingga tahun 2023 dipengaruhi negatif secara signifikan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan turun seiring dengan peningkatan PDRB dan IPM. Meskipun hasilnya baik, namun variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota juga mempunyai pengaruh yang cukup besar. Oleh karena itu, tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan meningkat apabila adanya peningkatan UMK. TPT di delapan kabupaten/kota provinsi Banten secara bersamaan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor - faktor PDRB, IPM, dan UMK.

Saran yang dapat diberikan untuk para pemangku kebijakan yaitu diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dengan tingkat upah yang disesuaikan standar kebutuhan hidup layak. Memaksimalkan penghasilan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama pada sektor PDRB yang belum banyak dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Banten, serta meningkatkan kesempatan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Ruth Eviana Hutabarat dan Ibu Nurul Hanifah atas jasanya dalam membimbing penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga untuk Jurnal Ekonomi Sakti karena telah diberikan kesempatan untuk publish artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Salemba Empat
- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Pdrb Dan Ipm Terhadap Tpt Di Provinsi Sumbar. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433.
- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 1–161

- Boediono. (2012). *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro* (Cetakan Ke). BPFE-YOGYAKARTA.  
2019-5303-12
- Erlangga, A., Falevi, M. R., Putri, P., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2014-2023. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 161–177. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.191>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasan, M., Dinar, M., Rijal, S., Rahmatullah, Inanna, N. A. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Hastin, M., & Siswadi, F. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 10(1), 1–22.
- Kuncoro, M. (2015). *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi* (Cetakan Ke). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mahihody, A., Engka, D., & Luntungan, A. (2018). Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(03), 24–34.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar ekonomi makro. Terjemahan Chriswan Sungkono*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
- Mulyadi. (2019). *EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA Dalam Perspektif Pembangunan* (Edisi Revi). PT GRAFINDO PERSADA.
- Murni, A. (2013). *EKONOMIKA MAKRO Edisi Revisi* (Ria Novitasari (ed.); Cetakan Ke). PR Refika Aditama
- Prasetyani, D & Sumardi. (2020). *ANALISIS PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB)* (Cetakan I). CV. Djiwa Amarta Press.
- Qausar, najasyi, & Shinta Aminda, R. (2018). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Of Development Economic and Digitalization*, 1(1), 38–50.
- Samoelson & Nordhaus. (2004). *ILMU MAKRO EKONOMI* (Edisi Tuju). PT. Mefia Global Edukasi.
- Sukirno, S. (2013). *MAKROEKONOMI Teori Pengantar* (Edisi Keti). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Soeharjoto, & Mitha Rachma Oktavia. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 5(2), 94–102.
- Todaro, M. & Smith, S. (2012). *Economic Development* (Eleventh E). Adisson Wesley.